

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum

Mengenai penerapan ketentuan pidana di bidang konservasi hayati oleh aparat penegak hukum dimana kurangnya pemahaman berbagai segi konservasi yang berakibat kurang tepatnya penanganan perkara di pengadilan dan menghasilkan putusan yang tidak memuaskan dari sudut perlindungan dan kesadaran lingkungan.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep seperti keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial maka dari itu penegakan hukum merupakan perwujudan dari konsep-konsep tadi.¹

Menurut penulis sendiri, penegakan hukum merupakan sesuatu tentang nilai dan kaidah tentang keadilan, kepastian, kemanfaatan yang harus ditegakkan oleh semua aparat penegak hukum tidak terkecuali dalam menerapkan suatu keputusan agar tercipta hukum yang adil bagi semua orang.

Dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang ada di dalamnya berisi suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya yang mana

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1986

banyak tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Maka dalam penegakan hukum itu sendiri terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti:

- ❖ Faktor hukumnya, sendiri dimana hanya dibatasi pada undang-undang saja, dimana undang-undnag tidak berlaku surut, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- ❖ Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun dalam menerapkan hukumnya yang merupakan panutan dalam masyarakat yang memberikan contoh yang baik dalam mentaati setiap peraturan yang dibuatnya agar masyarakat tidak melanggarnya.
- ❖ Faktor sarana dan fasilitas, yang mendukung dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Tanpa adanya faktor ini tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik yang mencakup sarana dan fasilitas ini yakni seperti tenaga manusi yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang terorganisir dengan baik. Jika tidak ada hal tersebut tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- ❖ Faktor kebudayaan, merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Dalam kebudayaan (system) hukum dasarnya harus mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku serta nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik.

Dari kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya yang merupakan satu kesatuan dari penegakan hukum itu sendiri dan juga efektivitas dari penegakan hukum.

Ruang lingkup dari penegakan hukum tidak hanya meliputi *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance* dalam kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang aparat penegak hukum yakni seperti kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, masyarakatan serta lembaga yang berkaitan dengan hukum.

Maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role) dimana kedudukan merupakan posisi di dalam struktur masyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu dari hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban yang merupakan peranan tersebut dinamakan pemegang peranan dalam penegakan hukum dan hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat berbeda dengan kewajiban yakni merupakan beban dan tugas dari aparat penegak hukum. Maka dalam mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah² yang memuat tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan penegakan hukum tidak hanya menjadi tugas dari aparat penegak hukum tetapi juga setiap orang agar tercipta hukum yang adil bagi semua orang tanpa terkecuali.

² Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal 32

Penegakan hukum sendiri ditinjau dari dua sudut yang berbeda yakni ada dua:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana merupakan penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja

lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyelundupan

1. Pengertian Penyelundupan

Tindak Pidana penyelundupan terlebih dahulu tentang Ordonansi Bea (Rechten Ordonantie) karena tindak penyelundupan yang kita kenal merupakan warisan ketentuan yang diatur dalam Ordonansi Bea. Dalam perkembangannya melalui Undang-undang Drt Nomor 8 Tahun 1958 Ordonansi Bea yang dimasukkan ke dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi yakni Undang-undnag Drt Nomor 7 Tahun 1955.³

³ Soufnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 35

Penyelundupan berasal dari kata “selundup” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, kata “selundup” diartikan menyelunduk, menyuruh, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.

Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* diartikan sebagai berikut:

To import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law.

Artinya:

Mengimpor atau mengeksport secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean.

Dalam Kamus Bahasa Belanda-Indonesia, “smokkel” diartikan penyelundupan. Pada pasal 7 Ordonansi Bea (OB) mencantumkan kata “penyelundupan” tetapi arti atau penjelasan kata penyelundupan tidak dicantumkan. Pada Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 yang memuat arti penyelundupan sebagai berikut yakni:

“Penyelundupan ialah delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor), atau pemalsuan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)”.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1967, maka Penyelundupan ialah delik yang berkenaan dengan impor atau ekspor barang atau uang. Pada rumusan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menekankan hal pemasukan barang dan bea masuk. Sedangkan dalam *Webster Ninth New Colligate Dictionary* ditambah dengan ekspor jadi lebih lengkap. Namun belum sempurna, karena barang yang dilarang ekspor atau impor belum dimasukkan dalam rumusan.⁴

⁴ Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum, hal 3

Penyelundupan merupakan perbuatan dimana pelaku tidak mempunyai surat-surat yang di perlukan untuk nantinya di periksa oleh aparat setempat yang bertugas apakah barang yang dimuatnya merupakan barang yang legal dan dapat dijual kembali dengan aman ataupun sebaliknya apakah barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen resmi yang menunjukkan barang atau benda yang dimuat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan.

Perbuatan penyelundupan disebabkan oleh beberapa sebab, yang mana merupakan faktor yang mendorong terjadinya perbuatan penyelundupan. Dan faktor-faktor itu mempunyai hubungan kausal dengan motif maupun modus operandi yang digunakan para pelaku. Beberapa faktor lain juga mempengaruhi seperti faktor geografis dimana, Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, dan letak Indonesia di persimpangan jalan antara dua benua dengan garis pantai yang panjang sekali dan berdekatan sekali dengan negara-negara yang lebih maju di bidang industri sehingga memberikan kesempatan atau peluang, bagi para pengusaha untuk melakukan penyelundupan. Faktor lainnya yakni dari masyarakat sendiri dimana kurang partisipasinya dalam hal penyelundupan ini meskipun media massa cukup memuat berita-berita tentang penyelundupan, akan tetapi masyarakat masih bersikap pasif malah sebaliknya masyarakat merasa beruntung karena dapat membeli dengan harga yang murah dan tidak perlu repot dengan masalah perizinan dalam hal memelihara hewan langka yang dilindungi.⁵

⁵ Moch.Anwar, 1982, *Segi-segi Hukum Penyelundupan*, Jakarta, hal 59

Perbuatan penyelundupan dilakukan karena beberapa faktor yang dirasa oleh para pelaku untuk melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan semata serta memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia daripada memikirkan apa yang akan terjadi jika melakukan hal tersebut. Dan inilah yang menimbulkan banyak kasus penyelundupan yang terjadi baik itu satwa hidup, pakaian, dan barang lainnya yang diselundupkan.

Tindak pidana penyelundupan diatur dalam Pasal 25 OB ayat 1 dan 2 serta pasal 26b jo. Pasal 3 ayat 2 OB. Pasal 25 OB mengatur antara lain:

1. Dapat dipidana, nakhoda yang dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian:
 - a. Tidak atau terlambat memenuhi peraturan tentang penyerahan dokumen-dokumen pada waktu kedatangan kapal.
 - b. Tidak menyebut barang-barang pada pemberitahuan atau daftar pemberitahuan yang dimaksud huruf a, termasuk didalamnya:
 - Memberitahukan kurang jumlah barang-barang yang dikemas lebih dari 10%.
 - Tidak menyelesaikan PU/AA atau bukti-bukti pindah apal yang akan dibongkar dalam duane terrain (daerah pabean).
 - Sebelum berangkat ke luar daerah pabean, pada tuntutan pertama, tidak menunjukkan barang-barang menurut PU/AA atau bukti-bukti pindah kapal.
 - Mempunyai kekurangan atas jumlah bekal kapal yang diberitahukan, menurut pertimbangan melebihi pemakaian.
 - c. Memuat barang-barang tanpa dokumen
2. Dapat dipidana, barangsiapa dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian:

- a. Tidak memenuhi ketentuan tentang perlindungan pengangkutan, kecuali ketentuan yang dibuat berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Ordonansi Bea
- b. Tidak memasukkan barang-barang ke dalam entrepot atau tidak menyerahkan untuk diperiksa dalam jangka waktu yang telah ditentukan
- c. Tidak memberikan bukti tentang pengangkutan barang-barang ke luar daerah pabean dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Barangsiapa yang melakukan ketiga hal tersebut diatas atau atas nama siapa dilakukan, yang menyebabkan pemberian waktu itu, dianggap sebagai pelanggaran.

- a. Merintang, mempersulit, atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan pegawai-pegawai.⁶
- b. Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis, atau harga barang-barang dalam PU/AA, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam PU/AA tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang lain.
- c. Merusak materai atau timah atau membuat perubahan, coretan-coretan, atau tambahan-tambahan di dalam dokumen-dokumen yang telah ditandatangani pegawai, maka barangsiapa yang menguasai, atau menyerahkan barang-barang atau dokumen-dokumen itu, dianggap sebagai pelaku delik.
- d. Tidak menyerahkan dokumen pada tuntutan pertama, atau menyerahkan dokumen yang tidak sah, disamakan dengan tidak mempunyai dokumen.

⁶ *Ibid*, hal 15

Pasal 3 ayat 2 OB yang disebut dalam Pasal 25 ayat 2a diatas berbunyi sebagai berikut:

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya tentang pengangkutan ke dan dari pelabuhan, maka Menteri Keuangan dengan semufakat Menteri Dalam Negeri, berhak untuk menunjuk jalan-jalan daratan atau perairan atau daerah-daerah di mana barang-barang yang ditunjuknya dilarang diangkut dan/atau berada dalam sebuah bangunan atau dipekarangannya, jika tidak dilindungi dengan dokumen dari pegawai bea dan cukai atau dari jawatan-jawatan lain yang ditunjuknya.⁷

Pasal 25 ayat 2c Ordonansi Bea mengatur sebagai berikut:

Dapat dihukum, barangsiapa yang *dengan sengaja* atau *karena kelalaian* memberitahukan yang tidak benar tentang jumlah, jenis, atau harga barang-barang dalam pemberitahuan pemasukan barang, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran, atau tidak memberitahukan barang-barang dalam pemberitahuan yang dikemas dengan barang lain.

Pasal 26 Ordonansi Bea:

Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau berupaya mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengidahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun yang menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua pasal 3, dihukum... dan seterusnya.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pasal tersebut sebagian ahli melakukan pembagian atas delik yang tercantum dalam Pasal 26b Ordonansi Bea, yaitu:

⁷ Ibid, hal 17

1. Mengimpor atau mengekspor barang-barang atau berupaya mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengidahkan ketentuan Ordonansi Bea (OB) dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya.
2. Mengangkut atau menyimpan barang-barang bertentangan dengan suatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 3 ayat 2 OB.⁸

Berdasarkan Pasal 26c OB, tindak pidana yang dimaksud pasal 26b dianggap sebagai kejahatan sedangkan yang disebut dalam Pasal 25 ayat 2c OB yakni memberi laporan atau pemberitahuan yang salah dikategorikan sebagai pelanggaran. Pengertian pemberitahuan yang salah sangat luas. Yang dapat diartikan jumlah yang salah, timbangan yang salah, atau kualitas yang salah, bahkan dokumen yang berbeda dengan kenyataan barang yang diangkut.

Pasal 25 ayat 2c OB pada saat ini masih menimbulkan berbagai pendapat yakni Peradilan berpendapat dalam hal dokumen tidak cocok dengan barang yang dilindungi jika tertangkap di daerah peredaran bebas atau di tempat penimbunan di luar pelabuhan (dalam hal impor) atau telah dimuat ke dalam kapal (dalam hal ekspor), maka dikategorikan penyelundupan, jadi melanggar Pasal 26b OB, jika barang-barang masih dalam *duane terrain* (daerah Pabean) yang masih dianggap penyelundupan administrasi jadi melanggar Pasal 25 ayat 2c OB terhadap barang-barang yang dilarang impor/ekspor, tidak ada permasalahan dokumen karena jelas telah terjadi tindak pidana penyelundupan yang melanggar Pasal 26b OB.⁹

Di dalam tindak pidana penyelundupan sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 Ordonansi Bea (OB) jo pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 yang peraturan pelaksanaannya berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1958 telah disebutkan, barang siapa yang melakukan tindak pidana penyelundupan

⁸ *Ibid*, hal 18

⁹ *Ibid*, hal 19

yakni dengan adanya unsur subyektif dan unsur obyektif. Yang mana unsur subyektif, yakni dengan maksud untuk mencari keuntungan baik bagi diri sendiri atau bersama-sama mengekspor ataupun mengimpor secara melawan hukum. Sedangkan unsur obyektif yakni barang siapa yang mengekspor ataupun mengimpor tidak dengan melalui prosedur tata laksana sebagaimana diatur dalam ekspor impor barang.

Unsur-unsur Tindak Pidana penyelundupan menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Adapun unsur-unsur tindak pidana penyelundupan ini diatur dalam Ketentuan Pidana Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang kepabeanan, yaitu:

Pasal 102, Setiap orang yang:¹⁰

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau di izinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹¹

¹⁰ Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pasal 102

¹¹ *Ibid*, hal 33

Didalam merumuskan unsur subyektif dan obyektif maka penulis mengambil teori dari D.Simons bahwa penjelasan bahwa suatu tindak pidana dapat terjadi ketika terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut, yaitu sebagai berikut:

- ❖ Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- ❖ Melanggar peraturan pidana, yaitu dalam artian bahwa suatu tindakan akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- ❖ Diancam dengan hukuman, yaitu hal ini bermaksud bahwa Undang-undang Kepabeanan mengatur tentang kadar hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- ❖ Dilakukan oleh orang yang bersalah, yaitu dimana unsur-unsur kesalahan yakni harus adanya kehendak, keinginan atau kemauan (niat) dari orang-orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.
- ❖ Pertanggungjawaban yang menentukan, yaitu bahwa orang-orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Apabila seseorang yang juga memperniagakan fauna langka yang di lindungi di Indonesia tanpa ijin sebagaimana yang ada pada pasal 21 ayat 1 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya untuk mengambil keuntungan, maka orang tersebut haruslah terbukti telah melakukan tindak pidana memperniagakan serta menyelundupkan.

Perbuatan melakukan tersebut haruslah dilakukan “dengan sengaja” yakni karena pada Undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia tidak mengenal tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja. Perbuatan tersebut haruslah direncanakan terlebih dahulu dengan menyiapkan dan mengatur apa saja yang dibutuhkan untuk dapat mengelabui para petugas Kepolisian setempat. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan terdapat 24 sanksi administratif yakni pada pasal 82 yakni dengan sanksi minimal berupa denda sebesar Rp.1 juta dan sanksi maksimal berupa denda sebesar Rp.50 juta serta denda dalam bentuk kelipatan nilai nominal pelanggaran minimal 100% dan maksimal 1000% dari nominal pelanggaran tersebut.

Aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana penyelundupan dan sebagai dasar hukum sebagai alasan pemidanaan hingga sanksi pidana telah diatur dalam suatu perundang-undangan yang berbentuk dalam Ordonansi Bea di dalamnya telah ditentukan pasal 1 sub 1 h, yakni pelanggar sesuatu ketentuan yang bertentangan dengan Ordonansi Bea (OB) tersebut merupakan tindak pidana ekonomi. Dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Drt 1955 berlaku juga bagi para pelanggar Ordonansi Bea yakni mengatur tentang segi hukum pidana, hukum acara pidana, dan putusan pidananya. Dan dalam Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 merupakan Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) yang di dalamnya memuat dan mengatur tentang tindak pidana penyelundupan

karena sampai saat ini belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas tentang penyelundupan itu sendiri. Dan yang mengatur dari segi penyelidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi pidana serta memberi keputusan diatur dalam Ordonansi Bea (OB), Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 jo Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1958 serta Undang-undang Nomor 21 Prp Tahun 1959 Tentang Pemberian Sanksi pidana yang diperberat bagi pelaku tindak pidana penyelundupan.

Selain ketentuan-ketentuan pasal di atas ada juga sanksi-sanksi bagi oknum-oknum tindak pidana penyelundupan yang memalsukan dokumen ataupun surat-surat yakni dalam KUHP pasal 263 yang berbunyi:

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak di palsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemasulan surat, dengan hukuma penjara selama-lamanya enam tahun.¹²

Pada ancaman pidana atau dasar ppidanaan yang disebutkan pada kategori kedua, untuk ancaman pidana bagi yang melakukan tindak pidana menurut pasal 25 ayat 1 dan 2 OB yang berbunyi:

1. Dapat dipidana nakhoda yang dengan sengaja atau salah karena kelalaian
2. Dapat dipidana barang siapa yang dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian.

¹² R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politiea, Bogor, hal 195

Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi dasar dari hukum pidana adalah berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) dan pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Prp 1959 yang mengatur tindak pidana penyelundupan.

Bahwa orang yang melakukan Tindak Pidana Penyelundupan itu karena ingin memperoleh keuntungan belaka dengan menggunakan kelemahan-kelemahan yang ada pada peraturan perundang-undangan yakni dengan sengaja melanggar prosedur ekspor impor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan maupun tertib administrasi perundang-undangan atau perniagaan baik luar maupun dalam negeri. Tak ada suatu perbuatan yang tidak mempunyai sebab-sebab termasuk dalam hal kejahatan terutama penyelundupan fauna langka yang dilindungi yang bermotif untuk menjual hasil buruan mereka kepada orang yang telah membelinya dan dengan tidak dilengkapi surat-surat resmi yang ada. Tiap-tiap kejahatan yang ada pastinya didalamnya ada pelaku kejahatan atau biasa disebut penjahat sebagai faktor pencetusnya.

Menurut A.Gumilang bahwa penjahat adalah seseorang yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.¹³

Dengan kata lain selama belum dijatuhi hukuman maka seseorang tersebut belum dapat dianggap sebagai penjahat. Dalam kriminologis istilah kriminalitas secara etimologis dapat diartikan juga sebagai kejahatan makna dari kriminalitas berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan. Menurut S.Wojowasito dan W.J.S Poerwadarminta bahwa *crime* merupakan kejahatan dan *criminal* dapat diartikan jahat atau penjahat, maka kriminalitas dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan.¹⁴

¹³ A.Gumilang, 1991, *Kriminalistik, Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Bandung: Angkasa, hal 3

¹⁴ Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya Offset, hal 11

Penjahat merupakan seseorang yang melakukan suatu kejahatan namun sebelum ia di cap sebagai penjahat ia harus melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dan nantinya ia akan mendapat sanksi yang sesuai dengan perbuatannya serta harus bertanggungjawab dengan apa yang ia lakukan karena merugikan orang lain.

C. Tinjauan Umum Tentang Fauna Langka

1. Pengertian Fauna

Fauna merupakan semua jenis sumber daya alam hewani baik itu yang hidup di darat, di air maupun di udara.¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata “langka” yakni jarang di dapat, jarang ditemukan, jarang terjadi. Hewan Langka adalah hewan yang jumlahnya sangat sedikit atau langka, Jika populasi menurun cepat dan jumlahnya diseluruh dunia kurang dari 10.000 ekor saja. Jadi, hewan dan tumbuhan langka adalah hewan atau tumbuhan yang jumlahnya sangat sedikit atau langka, jika populasi menurun cepat dan jumlahnya diseluruh dunia kurang dari 10.000 Ekor saja.

Status yang biasa dipakai adalah ‘Hewan Terancam Punah’ sebagaimana yang biasa digunakan oleh berbagai lembaga konservasi semacam IUCN (*International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources*) yang rutin mengklasifikasi dan merilis daftar *IUCN Red List of Threatened Species*.

Dalam status keterancaman yang dikeluarkan oleh *IUCN Redlist* (2012), terdapat 73 hewan asli Indonesia yang berada dalam status keterancaman tertinggi yaitu status *Critically Endangered* (Kritis), 170 spesies berstatus *Endangered* (Terancam) dan 523 spesies berstatus *Vulnerable* (Rentan) yakni¹⁶:

- **Badak Jawa** (*Rhinoceros sondaicus*); Disebut juga sebagai Badak Bercula Satu, Binatang endemik jawa yang hanya bisa dijumpai di Taman Nasional

¹⁵ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 angka (5) dan (6)

¹⁶ Laboratorium IPA, *Pengertian Beserta Contoh Hewan dan Tumbuhan Langka*, <http://www.pelajarz.id>

Ujung Kulon (Banten) dengan populasi hanya 35 hingga 45 ekor saja (hasil sensus Badak 2011).

- **Kanguru Pohon Wondiwoi** (*Dendrolagus mayri*) atau *Wondiwoi Tree-kangaroo*; Salah satu jenis kanguru pohon asal Papua ini populasinya diperkirakan sekitar 50 ekor saja.

- **Pesut Mahakam** (*Orcaella brevirostris*) atau *Irrawaddy Dolphin*; Merupakan mamalia air tawar yang unik. Di Indonesia hidup di Sungai Mahakam dengan populasi sekitar 70 ekor.

- **Macan Tutul Jawa** (*Panthera pardus melas*) atau *Javan Leopard*; Disebut juga Macan Kumbang dengan jumlah populasinya diperkirakan di bawah 250 ekor (IUCN 2008).

- **Badak Sumatera** (*Dicerorhinus sumatrensis*) atau *Sumatran Rhinoceros*; Merupakan badak bercula dua yang populasinya diperkirakan tidak lebih dari 275 ekor.

- **Kura-kura Hutan Sulawesi** (*Leucocephalon yuwonoi*) atau *Sulawesi Forest Turtle*; Kura-kura endemik sulawesi yang pernah terdaftar sebagai *The World's 25 Most Endangered Tortoises and Freshwater Turtles—2011* dengan populasi kurang dari 250 ekor.

- **Elang Flores** (*Nisaetus floris*) atau *Flores Hawk-Eagle*; Burung elang endemik Flores dengan populasi antara 150-300 ekor.

- **Rusa Bawean** (*Axis kuhlii*) atau *Bawean Deer*; Rusa endemik pulau Bawean, Jawa Timur. Populasinya antara 250–300 ekor.

- **Tokhtor Sumatera** (*Carpococcyx viridis*) atau *Sumatran Ground Cuckoo*; Burung endemik Sumatera dengan populasi sekitar 70-400 ekor.¹⁷

Pengertian “satwa” menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah sebagai berikut:

“Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air.”

Pengertian “satwa liar” dimuat pada Pasal 1 butir 7 yakni sebagai berikut:

“Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.”

Penjelasan Pasal 1 butir 7 memuat sebagai berikut:

“Ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk dalam pengertian satwa.”

Hal yang sangat erat hubungannya dengan “satwa” adalah “habitat”. Pengertian “habitat” menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 butir 8 adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat berkembang

¹⁷ *Ibid*, hal 13

hidup dan berkembang secara alami.¹⁸

Arti kata fauna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni fau-na “keseluruhan kehidupan hewan suatu habitat, daerah, atau strata geologi tertentu; dunia hewan”.¹⁹

Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara terbesar yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Satwa Indonesia memiliki keanekaragaman yang tinggi karena wilayahnya yang luas dan berbentuk kepulauan tropis. Keanekaragaman yang tinggi ini disebabkan oleh Garis *Wallace*, membagi Indonesia menjadi dua area; zona zoogeografi Asia, yang dipengaruhi oleh fauna Asia, dan zona zoogeografi Australasia, dipengaruhi oleh fauna Australia. Pencampuran fauna di Indonesia juga dipengaruhi oleh ekosistem yang beragam di antaranya: pantai, bukit pasir, muara, hutan bakau, dan terumbu karang.

Masalah ekologi yang muncul di Indonesia adalah proses industrialisasi dan pertumbuhan populasi yang tinggi, yang menyebabkan prioritas pemeliharaan lingkungan menjadi terpinggirkan. Keadaan ini menjadi semakin buruk akibat aktivitas pembalakan liar, yang menyebabkan berkurangnya area hutan; sedangkan masalah lain, termasuk tingginya urbanisasi, polusi udara, manajemen sampah dan sistem pengolahan limbah juga berperan dalam perusakan hutan.

Terjadinya penyeludupan satwa langka yang banyak terjadi akhir-akhir ini membuat resah, ini akibat dari para pelaku yang tidak bertanggung jawab hanya karena ingin mendapatkan keuntungan saja. Dan semakin lama satwa

¹⁸ Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan Hasil Hutan Dan Satwa*, Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama, hal 47

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

dan tumbuhan yang ada di Indonesia akan mengalami kepunahan jika terus saja terjadi penyelundupan yang berulang-ulang.

Maraknya perdagangan fauna tanpa ijin ini akibat dari permintaan pasar yang tinggi dimana para pembeli bisa menginginkan hewan yang masih bisa dipelihara dan terkadang ada yang meminta yang masih hidup agar bisa dipelihara. Dan tak sedikit yang dibunuh dan diawetkan untuk menjadi koleksi yang merupakan tren gaya hidup atau *life style* saat ini.

Peran aparat penegak hukum dan masyarakat juga berperan penting untuk dapat memberantas perniagaan fauna langka tanpa ijin tersebut. Maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan tersebut Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya bekerjasama dengan instansi lain agar dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang sah apabila melakukan pengiriman barang. Hal ini dilakukan agar dapat memudahkan petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam menjalankan tugasnya dan terhindar dari masalah-masalah penyelundupan kembali.

2. Tinjauan Umum tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati, dan sumber daya buatan.²⁰

Sumber daya alam hayati di Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam kehidupan dan pembangunan nasional,

²⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

maka sudah seharusnya kita melestarikan bukannya membuat satwa-satwa semakin punah karena satu sama lainnya saling bergantung dengan lainnya. Walaupun telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam Undang-undang Dasar 1945 juga terdapat pengelolaan sumber daya alam hayati yang ada di pembukaan pada pasal 33 ayat 3 bahwa kekayaan alam Indonesia termasuk sumber daya alam hayati yang ada di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.²¹

Pengertian atau istilah dari konservasi (conservation) yakni suatu usaha pengelolaan yang dilakukan oleh manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya secara berkelanjutan untuk generasi manusia saat ini, serta tetap dapat memelihara potensinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi pada generasi selanjutnya.²²

Dimana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya beraskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang agar lingkungan tetap terjaga kelestariannya. Tujuan dari konservasi sumber daya alam hayati dan

²¹ *Ibid*, hal 3

²² Widada, 2001, *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Upaya Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun*, Program Pasca Sarjana/ Institut Pertanian Bogor

ekosistemnya mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan yakni:

a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan

Perlindungan sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah menetapkan yakni:

- ❖ Wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- ❖ Pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- ❖ Pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.²³

b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bertujuan untuk:

- ❖ Menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan.
- ❖ Menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa.
- ❖ Memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui upaya:

- Penetapan dan penggolongan yang dilindungi dan tidak dilindungi.
- Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya.
- Pemeliharaan dan pengembangbiakan.

c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.²⁴

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- ❖ Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian

²³ M.Hariyanto, *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, <http://blogmhariyanto.com>

²⁴ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

- ❖ Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Perlindungan keanekaragaman sumber daya hayati sangatlah penting bagi lingkungan agar tercipta lingkungan yang sehat dan satwa-satwa tidak mengalami kepunahan serta adanya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa bertujuan untuk menjaga agar ekosistemnya tidak punah.

D. Tinjauan Pengaturan Mengenai Perlindungan Fauna Langka yang Dilindungi

Peraturan yang terkait tentang perlindungan hewan langka yang dilindungi berdasarkan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kebijakan tentang perlindungan flora langka yang dilindungi ini terdapat pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan juga dalam Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Flora and Fauna dimana Indonesia turut ikut serta menandatangani, namun karena belum dirumuskan dalam bentuk perundang-undangan, konvensi tersebut belum dapat diterapkan di Indonesia tetapi pada tahun 1978 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43 Tahun 1978 tentang pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dimana CITES merupakan perjanjian internasional atau multilateral yang terkait dengan perlindungan dan perdagangan internasional spesies satwa dan tumbuhan yang terancam punah konvensi yang ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1973 dikenal dengan Konvensi Washington dan Indonesia terdaftar sebagai Negara ke 48 dalam CITES.²⁵

Dalam meratifikasi CITES Indonesia membutuhkan duabelas tahun dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut yakni pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan membutuhkan Sembilan tahun untuk dapat mensahkan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam perlindungan satwa dan tumbuhan yang dilindungi. Pada peraturan pelaksana

²⁵ Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 Tentang Pengesahan Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora

diantaranya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam ataupun di luar habitatnya yang tidak punah pada Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang upaya untuk pengawetan, penetapan jenis satwa dan tumbuhan, pengelolaan jenis satwa dan tumbuhan, pengiriman ataupun pengangkutan satwa dan tumbuhan yang dilindungi.

CITES ditandatangani di Washington pada tanggal 2 Maret 1973 oleh 85 Negara dan pada bulan Mei beranggotakan 99 negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, pengendalian perdagangan dalam satwa liar telah dimulai pada tahun 1870-an di Eropa dan Amerika Serikat karena banyaknya burung yang dibunuh dan dijadikan aksesoris seperti topi. CITES merupakan satu-satunya tindakan pengendalian perdagangan satwa liar di tingkat internasional dan dimaksudkan untuk mengembangkan konservasi spesies yang dibahayakan sambil memperkenalkan perdagangan spesies satwa liar yang dapat menghadapi perdagangan yang terus terjadi. Dalam CITES sendiri terdapat 3 lampiran, dalam Appendix lampiran I yakni perdagangan komersial spesies yang diancam dengan kepunahan pada umumnya dilarang dimana spesies ini hanya boleh diperdagangkan dalam keadaan khusus hanya untuk penelitian atau pameran saja satwa tersebut meliputi semua monyet besar, kura-kura laut, badak, ikan paus, gajah dan 300 spesies lainnya. Pada Appendix II hanya mengizinkan perdagangan komersial tradisional dengan

persyaratan dalam spesies yang belum dibahayakan tetapi perlu dipantau yang hanya boleh di ekspor oleh negara asalnya yang meliputi 2300 spesies satwa dan 24000 spesies tumbuhan. Sedangkan, pada Appendix III meliputi membantu Negara-negara tertentu dalam memperoleh kerjasama internasional dalam melindungi spesies asli dimana dapat diperdagangkan asal mendapat izin dari Negara asalnya.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam peraturan ini pemanfaatan satwa yakni diantaranya:

- 1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan
- 2) Penangkaran
- 3) Perdagangan
- 4) Peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat berupa koleksi hidup atau koleksi mati yang termasuk bagian-bagiannya.
- 5) Budidaya tanaman obat-obatan
- 6) Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan populasi, memperkaya, keanekaragaman jenis, penelitian dan ilmu pengetahuan.
- 7) Pemeliharaan untuk kesenangan
- 8) Pengiriman dan pengangkutan tumbuhan dan satwa liar²⁶

Peraturan yang mengatur tentang satwa yang dilindungi diatur pada Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) jo Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yakni pada Pasal 40 ayat (2) menyatakan antara lain sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pada Pasal 40 ayat (4) menyatakan antara lain:

²⁶ Pokja, 2013, Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan Dan Kebijakan Bogor, hal 35

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Perbedaan pokok Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) terletak pada unsur subjektif, yakni sengaja dan kelalaian. Perbuatan atau tindak pidana yang dirumuskan pada Pasal 21 ayat (2) terdiri dari lima jenis perbuatan, yakni:

- a. *Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.*²⁷

Dalam rumusan diatas dapat diartikan membunuh, melukai, dan memperniagakan memiliki kadar bahaya kepunahan yang lebih tinggi dari perbuatan lainnya. Perbuatan memperniagakan menimbulkan rangsangan untuk menangkap (memburu) dengan tujuan mendapat laba atau keuntungan. Sedangkan menangkap, menyimpan, memiliki, dan memelihara merupakan suatu rangkaian perbuatan kecuali menangkap untuk memperniagakan yang mungkin untuk kesenangan. Tidak semua perbuatan menangkap dapat dihukum, misalnya:

- ❖ Seekor satwa dalam keadaan sakit atau luka lalu ditangkap semata-mata untuk diobati atau dilindungi.

²⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan Hasil Hutan Dan Satwa*, Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama, 1995

- ❖ Mengangkut satwa-satwa yang tidak dapat terbang dengan maksud untuk menyelamatkan seperti halnya burung yang sayapnya tidak dapat dipergunakan.

Dalam keadaan tersebut perbuatan menangkap tidak dapat dipersalahkan.

Penerapan Pasal 21 ayat (2) itu perlu memperhatikan Pasal 22 ayat (1) yang diantaranya mengatur penyelamatan satwa. Perbuatan yang dilarang pada bagian 1 terdiri dari delapan perbuatan terhadap satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yakni:

- 1) *Menangkap*
- 2) *Melukai*
- 3) *Membunuh*
- 4) *Menyimpan*
- 5) *Memiliki*
- 6) *Memelihara*
- 7) *Mengangkut*
- 8) *Memporniagakan*

Maka jika dikaitkan dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁸

“Barang siapa dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut atau memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).”

²⁸ *Ibid*, hal 48

Untuk perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian seperti dinyatakan pada pasal 40 ayat (4) sulit untuk dirumuskan namun hal tersebut bisa terjadi selain faktor kelalaian yakni:

❖ Menangkap

Dalam hal penangkapan ikan dengan jala dimana kemungkinan ikan yang terjaring yang termasuk jenis ikan yang dilindungi.

❖ Memiliki

Dalam hal memiliki satwa yang mungkin termasuk dilindungi jika warna dan bentuknya mirip dengan satwa yang tidak dilindungi.

Berdasarkan contoh diatas dapat ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan karena adanya faktor kelalaian maka setiap kasus atau kejadian harus diamati satu per satu untuk dapat menentukan perbuatan tersebut terjadi karena faktor kelalaian atau tidak.

b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati

Perbuatan-perbuatan tersebut dirumuskan pada Pasal 21 ayat (2) huruf b yang terdapat 5 jenis perbuatan, yakni.²⁹

- a. Menyimpan
- b. Memiliki
- c. Memelihara
- d. Mengangkut
- e. Memperniagakan

Pada Pasal 21 ayat (2) huruf a, maka pada huruf a ada 3 perbuatan yang tidak terdapat pada huruf b yakni: menangkap, melukai, membunuh karena perbuatan tersebut tidak mungkin dilakukan pada satwa mati.

²⁹ *Ibid*, hal 48

Dalam hal ini terhadap satwa yang dilindungi dalam keadaan mati cukup ditentukan 4 perbuatan yakni: menyimpan, memiliki, mengangkut, memperniagakan.

Maka kaitannya dengan Pasal 40 ayat (4), maka perbuatan memiliki karena kelalaian sulit diartikan kemungkinan adanya kekeliruan dalam mempergunakan kata memiliki, maka rumusan yang tepat sebenarnya menggunakan kata menguasai, bukan kata memiliki karena menguasai belum tentu memiliki. Pada Pasal 40 ayat (2) jika dikaitkan dengan Pasal 21 ayat (2) huruf b maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

- c. *Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.*³⁰

Dalam rumusan tersebut dimaksudkan untuk dapat mempertahankan habitat atau lingkungan tempat satwa dapat hidup dan berkembang secara alami. Kata mengeluarkan yakni memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, dalam arti luas menangkap dan mengangkut juga termasuk pengertian mengeluarkan namun keduanya telah diatur pada Pasal 21 ayat (2), maka arti kata mengeluarkan yakni tanpa menangkap atau mengangkut contohnya mengusir atau mengusik sehingga satwa tersebut berpindah atau keluar dari tempatnya yang semula.

³⁰ *Ibid*, hal 49

d. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia atau ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Dari uraian diatas terdapat 3 (tiga) perbuatan yaitu:

- a. Memporniagakan
- b. Menyimpan
- c. Memiliki

Obyeknya yaitu kulit, tubuh, bagian-bagian yang dilindungi jadi memperniagakan, dan memiliki atau menyimpan barang-barang yang dibuat dari kulit atau tubuh serta bagian satwa yang dilindungi hal ini dilarang dan orang yang melakukannya diancam dengan hukuman pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 40 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990.

*e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.*³¹

Dalam rumusan diatas perbuatan mengambil, dan memiliki telur satwa yang dilindungi karena kelalaian tetapi memiliki sarang tanpa menguasai contohnya memiliki sebuah pohon yang ditempati oleh satwa yang sedang bertelur dan ia tidak mengetahuinya maka nantinya dia tidak dipersalahkan namun sebaliknya jika ia mengetahuinya maka ia akan mendapat sanksi.³²

³¹ *Ibid*, hal 50

³² *Ibid*, hal 51

Setiap tindakan yang dilakukan terdapat suatu pengertian yang masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Pada pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati sudah diatur tentang perbuatan apa saja yang dapat melukai ataupun hal yang lainnya pada satwa.

Dalam konvensi yang mengatur perlindungan dan perdagangan Internasional spesies satwa dan tumbuhan yang terancam punah yakni CITES ini merupakan langkah awal dimana pemerintah Indonesia melakukan hal tersebut untuk perlindungan terhadap satwa dan tumbuhan yang dilindungi agar ekosistemnya tidak terganggu baik itu di luar habitatnya dan tidak terancam punah.

